

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015 sampai dengan 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang diperoleh dari BEI dalam penelitian ini sebanyak 68 selama dua periode, dengan jumlah sampel yang diolah sebanyak 31 sampel pada tahun 2015 dan 37 sampel pada tahun 2016. Adapun kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1
Prosedur Pemilihan Sampel

No	Keterangan	2015	2016
1	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI	43	43
2	Perusahaan yang tidak memiliki laporan tahunan dan laporan keuangan secara lengkap tahun 2015-2016	0	0
3	Perusahaan perbankan tidak pernah di- <i>delisting</i> selama periode pengamatan	0	0
4	Perusahaan yang tidak memiliki informasi seperti NPL, LDR, kepemilikan asing, dewan komisaris independen, kualitas audit	(12)	(6)
5	Laporan keuangan tidak disajikan perusahaan dalam mata uang Rupiah (Rp)	0	0
6	Jumlah sampel pertahun	31	37
7	Jumlah seluruh sampel perusahaan perbankan	68	

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

B. Uji Kualitas Instrumen Data

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai jumlah sampel pengamatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Hasil statistik dari masing-masing variabel disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 4.2
Statistik Deskriptif Perusahaan Perbankan

Nama Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
KREDIT	68	0,00210	0,88256	0,04563	0,10563
LIKUID	68	0,00290	6,54789	0,96155	0,71608
FOREIGN	68	0,00001	0,98999	0,42752	0,32897
DKI	68	0,33333	0,80000	0,57106	0,09323
KuAUDIT	68	0	1	0,68	0,471
MDSCORE	68	0,45946	0,63063	0,54058	0,04592
Valid N (listwise)	68				

Sumber: Hasil Olah Data Statistik, 2017

TABEL 4.3
Statistik Deskriptif Kualitas Audit

	Frekuensi	Presentasi
Valid 0	22	32,4
Valid 1	46	67,6
Total	68	100,00

Sumber: Hasil Olah Data Statistik, 2017

Keterangan:

KREDIT : Kredit Bermasalah

LIKUID : Likuiditas

FOREIGN : Kepemilikan Asing

DKI : Dewan Komisaris Independen

KuAUDIT : Kualitas

MDSCORE : Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian statistik pada tabel 4.2 dan 4.3 dengan jumlah sampel 68 perusahaan perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kredit bermasalah yang diukur menggunakan NPL (*Non Performing Loan*) memiliki nilai minimum sebesar 0,00210 dan nilai maksimum sebesar 0,88256. Dapat dijelaskan bahwa rasio kredit bermasalah di perbankan memiliki nilai terendah 0,210% yaitu pada perusahaan PT Bank Ina Perdana dan rasio tertinggi yaitu pada perusahaan PT Bank Mayapada Internasional sebesar 88,256%. Nilai rata-rata sebesar 0,04513 dan standar deviasi sebesar 0,10579. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa kredit bermasalah yang diukur dengan NPL pada perusahaan perbankan tahun 2015 dan 2016 sebesar 4,513% berada dibawah ketentuan BI yaitu 5%, artinya kondisi kredit bermasalah pada bank berada pada kondisi yang baik karena nilai rata-ratanya dibawah 5%.

Likuiditas yang diukur menggunakan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) memiliki nilai minimum sebesar 0,00290 dan nilai maksimum sebesar 6,54789. Dapat dijelaskan bahwa rasio likuiditas di perbankan memiliki rasio terendah 0,29% yaitu pada perusahaan PT Bank Mayapada Internasional dan terdapat perusahaan yang memiliki rasio tertinggi sebesar 654,789% yaitu pada perusahaan PT Bank Panin Syariah. Nilai rata-rata sebesar 0,96155 dan standar deviasi 0,71608. Artinya likuiditas di perusahaan perbankan tahun

2015 dan 2016 sebesar 96,155% rasio ini berada di atas ketentuan BI yaitu 94%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat likuiditas di perusahaan perbankan tahun 2015 dan 2016 dikatakan baik karena memiliki rata-rata likuiditas lebih dari 94%.

Kepemilikan asing memiliki nilai minimum sebesar 0,00001 dan nilai maksimum sebesar 0,98999. Artinya tingkat kepemilikan perusahaan bank oleh asing disalah satu bank masih sedikit dengan nilai terendah 0,001% yaitu pada perusahaan PT Bank Maspion dan terdapat pula perusahaan yang hampir seluruhnya dikendalikan oleh asing dengan tingkat kepemilikan tertinggi 98,999% yaitu pada perusahaan PT Bank J Trust Indonesia. Nilai rata-rata dari kepemilikan asing sebesar 0,42752 dan standar deviasi sebesar 0,32897. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan bank di Indonesia hampir sebagian dimiliki oleh asing dengan tingkat kepemilikan rata-rata 42,752%, artinya kepemilikan asing di bank yang berada di Indonesia memiliki kendali yang kuat karena rata-rata kepemilikan berada di atas 5%.

Dewan komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,33333 dan nilai maksimum sebesar 0,80000. Artinya proporsi dewan komisaris independen terendah sebesar 33% yaitu pada perusahaan PT Bank Of India Indonesia dan proporsi dewan komisaris tertinggi sebesar 80% yaitu pada perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Nilai rata-rata dari dewan komisaris independen sebesar 0,57106 dan standar deviasi sebesar 0,09323. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata dewan komisaris independen perusahaan perbankan di Indonesia sebesar 57,106% yakni telah melebihi

ketentuan minimal proporsi dewan komisaris independen sesuai Surat Edaran dari Bank Indonesia yaitu 50%.

Kualitas audit memiliki nilai minimum sebesar 0 dengan jumlah sampel 22 perusahaan dan nilai maksimum sebesar 1 sebanyak 46 perusahaan. Artinya sebanyak 32,4% laporan keuangan perusahaan perbankan diaudit oleh KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four* dan sebanyak 67,6% laporan keuangan perusahaan perbankan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four*. Nilai rata-rata sebesar 0,68 dan standar deviasi sebesar 0,471. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kualitas audit sebesar 68% dimana laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four*.

Pengungkapan wajib memiliki nilai minimum 0,45946 sebesar dan nilai maksimum sebesar 0,63063. Artinya pengungkapan wajib pada perusahaan perbankan terendah sebesar 45,946% yaitu pada perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Banten dan pengungkapan wajib tertinggi sebesar 63,063% yaitu pada perusahaan PT Bank Maybank Indonesia. Nilai rata-rata dari pengungkapan wajib laporan keuangan sebesar 0,5405 dan nilai standar deviasi sebesar 0,04592. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan wajib laporan keuangan sebesar 54,05% hasil ini menunjukkan tingkat pengungkapan baru mencapai setengah dari target pengungkapan wajib 100% dari Bapepam-LK No. X.K.6 KEP-431/BL/2012.

2. Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas suatu data dapat dilihat dari nilai signifikansi dari hasil uji *Kolmogorove-smirnov*. Tabel 4.4 menunjukkan ringkasan dari hasil uji normalitas.

TABEL 4.4
Hail Uji Normalitas *Kolmogorov-smirnov Test*

	Kolmogorov-Smirnov			Kesimpulan
	Statistic	df	Sig.	
Unstandardized Residual	0,069	68	0,200	Normal

Sumber: Hasil Olah Data Statistik, 2017

Dari tabel 4.4 menunjukkan hasil bahwa hubungan antara kinerja keuangan yang meliputi kredit bermasalah dan likuiditas dan mekanisme *corporate governance* yang meliputi kepemilikan asing, proporsi dewan komisaris independen, dan kualitas audit terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pada perusahaan perbankan dengan menggunakan uji sampel *one sample Kolmogorov-smirnov test* nilai sig sebesar 0,200 lebih besar dari alpha 0,05 maka data yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara variabel independen terhadap variabel dependen pada model regresi. Pendeteksian tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai

tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
KREDIT	0,888	1,126	Tidak Terjadi Multikolinearitas
LIKUID	0,955	1,047	Tidak Terjadi Multikolinearitas
FOREIGN	0,882	1,134	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DKI	0,859	1,164	Tidak Terjadi Multikolinearitas
KuAUDIT	0,931	1,075	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

Pada tabel 4.5 menunjukkan hasil penelitian yang diperoleh, yaitu kredit bermasalah, likuiditas, kepemilikan asing, proporsi dewan komisaris independen, dan kualitas audit memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa kelima variabel yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan yang lain untuk semua model regresi. Pendeteksian terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melakukan uji glejser dengan melihat nilai dari *p value*, data tidak mengandung heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari alpha 0,05. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti pada tabel 4.6.

TABEL 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
KREDIT	0,163	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
LIKUID	0,219	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
FOREIGN	0,087	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
DKI	0,546	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
KuAUDIT	0,869	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

Pada tabel 4.6 menunjukkan nilai signifikansi dari kredit bermasalah melalui proksi NPL adalah 0,163, likuiditas melalui proksi LDR adalah 0,219, kepemilikan asing sebesar 0,087, dewan komisaris independen sebesar 0,546, dan kualitas audit sebesar 0,869. Berdasarkan penjelasan di atas nilai signifikansi kelima variabel berada di atas 0,05. Dengan demikian, kelima variabel dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pengujian pada periode sekarang dengan periode sebelumnya. Pendeteksian autokorelasi menggunakan uji *run test* dengan melihat nilai dari *Durbin-Watson* dengan ketentuan bebas autokorelasi apabila $DU < DW < 4 - DU$. Berdasarkan uji regresi maka diperoleh hasil sebagai berikut:

TABEL 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Nilai DU	Nilai DW	Kesimpulan
1,7678	1,969	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

Pada tabel 4.7 menunjukkan nilai dari *Durbin-Watson* adalah 1,969 dan nilai DU 1,7678, karena nilai DW terletak diantara $DU < DW < 4-DU$ yaitu $1,7678 < 1,969 < 2,2322$ ($4-1,7678$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

C. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis ini menggunakan metode analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan program SPSS 22.0. Pengujian ini meliputi dua bagian yaitu nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) dan nilai statistik-*t*.

TABEL 4.8
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	<i>t</i> -Statistik	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	0,537	0,037	0,000	
KREDIT	-0,019	-0,371	0,712	Ditolak
LIKUID	0,001	0,084	0,933	Ditolak
FOREIGN	0,040	2,407	0,019	Diterima
DKI	-0,056	-0,939	0,351	Ditolak
KuAUDIT	0,027	2,387	0,020	Diterima
Adjusted R Square	0,158			
F hitung	3,515			
Signifikansi F	0,007			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen yang mampu menjelaskan variabel dependen. Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,158 artinya variabel pengungkapan wajib laporan keuangan dapat dijelaskan sebesar 15,8% oleh variabel kredit bermasalah, likuiditas, kepemilikan asing, dewan komisaris independen, dan kualitas audit sedangkan 84,2% (100%-15,8%) dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

2. Uji Nilai T

Uji t merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat apakah model dari regresi variabel independen secara parsial memberi pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji parsial (*t-test*). Jika nilai signifikansi setiap variabel menunjukkan angka dibawah 5% dan koefisien beta memiliki arah sesuai dengan yang dihipotesiskan maka hipotesis variabel tersebut diterima. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.8 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hipotesis pertama dari penelitian ini menyatakan bahwa kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan di perusahaan perbankan. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.9 diperoleh koefisien regresi untuk variabel kredit bermasalah sebesar -0,019 dan nilai t hitung sebesar -0,371 dengan signifikansi sebesar 0,712 yang mana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil ini menunjukkan

bahwa kredit bermasalah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Dengan demikian, H_1 ditolak.

Hipotesis kedua dari penelitian ini menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan di perusahaan perbankan. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.9 diperoleh koefisien regresi untuk variabel likuiditas sebesar 0,001 dan nilai t-hitung sebesar 0,084 dengan signifikansi sebesar 0,933 yang mana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Dengan demikian, H_2 ditolak.

Hipotesis ketiga dari penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan di perusahaan perbankan. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.9 diperoleh koefisien regresi untuk variabel kepemilikan asing sebesar 0,040 dan nilai t-hitung sebesar 2,407 dengan signifikansi sebesar 0,019 yang mana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Dengan demikian, H_3 diterima.

Hipotesis keempat dari penelitian ini menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan di perusahaan perbankan. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.9 diperoleh koefisien regresi untuk variabel proporsi dewan komisaris independen sebesar -0,056 dan nilai t-hitung sebesar -0,939

dengan signifikansi sebesar 0,351 yang mana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Dengan demikian, H_4 ditolak.

Hipotesis kelima dari penelitian ini menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan di perusahaan perbankan. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.9 diperoleh koefisien regresi untuk variabel kualitas audit sebesar 0,027 dan nilai t hitung sebesar 2,387 dengan signifikansi sebesar 0,020 yang mana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Dengan demikian, H_5 diterima.

D. Pembahasan

Penelitian ini menguji kredit bermasalah, likuiditas, kepemilikan asing, proporsi dewan komisaris independen, dan kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 2 variabel independen yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan, yaitu kepemilikan asing dan kualitas audit. Sedangkan 3 variabel independen yang lain tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan, yaitu kredit bermasalah, likuiditas dan proporsi dewan komisaris independen.

1. Pengaruh kredit bermasalah terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan

Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa kredit bermasalah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan, dengan demikian maka H_1 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Masrurroh dan Mulazid (2017) yang menunjukkan bahwa kredit bermasalah tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR.

Berdasarkan teori legitimasi, dimana prespektif legitimasi menyatakan bahwa perusahaan secara sukarela menyampaikan aktifitasnya jika manajemen menganggap informasi tersebut merupakan informasi yang diharapkan oleh komunitas (Deegan C, 2000). Hasil uji hipotesis ini sejalan dengan teori legitimasi meskipun rasio kredit bermasalah pada perusahaan berada pada rasio yang baik atau buruk manajemen menganggap hal tersebut harus tetap diungkapkan karena informasi tersebut merupakan informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi kepada publik merupakan salah satu cara agar legitimasi perusahaan tidak dipertanyakan (Guthrie dan Parker, 1989).

Tingginya nilai kredit bermasalah yang diproksikan dengan NPL menunjukkan bahwa bank tidak profesional dalam mengelola kreditnya. Akan tetapi tinggi rendahnya rasio kredit bermasalah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Hal ini dikarenakan tingkat NPL pada perusahaan sektor bank berada pada kondisi yang baik yaitu kurang dari 5% sesuai dengan hasil statistik deskriptif dimana rata-rata NPL

perbankan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 berada di bawah ketentuan BI yaitu 5%. Oleh karena itu, tinggi rendahnya NPL tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Selain itu, perbankan merupakan salah satu sektor perusahaan yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi dibandingkan perusahaan sektor lain (Hamdani, 2017).

2. Pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Dengan demikian H₂ ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Pradipta, dkk. (2016) serta Devi dan Suardana (2014) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.

Cooke (1989) menyatakan bahwa kondisi perusahaan yang sehat dapat dilihat dari tingkat likuiditas yang tinggi, berhubungan dengan pengungkapan yang lebih luas. Akan tetapi hasil penelitian ini menunjukkan tinggi rendahnya tingkat likuiditas tidak mempengaruhi seberapa banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan, hal ini sejalan dengan perspektif legitimasi dimana likuiditas merupakan hal yang harus diungkapkan karena likuiditas merupakan informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Meskipun perusahaan memiliki likuiditas yang rendah tetap akan mengungkapkan informasi terkait likuiditasnya dan dimungkinkan pengungkapan informasinya dapat lebih rinci dibandingkan

perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang baik. Berdasarkan data deskriptif statistik dalam penelitian ini rata-rata likuiditas perusahaan perbankan yang menjadi sampel yaitu 96,155%, di atas ketentuan BI dimana kebijakan jumlah minimum likuiditas yang harus dimiliki perusahaan yaitu 94%. Dengan demikian, dengan adanya tingkat minimum tersebut perusahaan tetap melakukan pengungkapan informasi di atas rata-rata (Pradipta dkk., 2016). Selain itu, kredit yang diberikan kepada bank tidak memberikan kontribusi yang banyak bagi pihak eksternal, karena semakin tinggi rasio likuiditas menunjukkan rendahnya kemampuan likuiditas bank (Yuniarsah dan Kurnia, 2014).

3. Pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Dengan demikian, maka H_3 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Sartawi dkk. (2014), Alvionita dan Taqwa (2015), serta Sari dan Andayani (2015) bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.

Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh asing akan menuntut adanya pengungkapan yang lebih lengkap dalam laporan keuangan perusahaan (Mangena dan Tauringana, 2007). Hal ini bertujuan untuk mengurangi informasi yang berbeda antara investor dalam negeri dan

investor asing sesuai dengan teori agensi. Selain itu, perusahaan yang dimiliki oleh asing memiliki sistem informasi manajemen yang lebih efisien dan terdapatnya permintaan informasi yang lebih besar kepada perusahaan (Rofika dan Apsari, 2011). Selain itu, semakin banyaknya pihak asing dalam perusahaan, dimungkinkan pihak asing akan menunjuk pihak asing pula untuk menjadi dewan direksi atau dewan komisaris dengan tujuan agar terjadinya keselarasan informasi antara asing dengan manajemen perusahaan terkait pengungkapan. Dengan demikian, semakin banyak informasi yang disajikan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang merupakan praktik dari *good corporate governance* berjalan dengan baik.

4. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Dengan demikian, H₄ ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Alvionita dan Taqwa (2015) dan Supriyono dkk. (2014) bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.

Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan dikarenakan dewan komisaris independen tidak cukup kuat terhadap perusahaan dan kecenderungan dewan komisaris independen untuk mengintervensi direksi dalam pelaksanaan

tugasnya (**Effendi, 2009**). Tidak cukup kuatnya dewan komisaris independen dalam perusahaan dikarenakan kedudukan dewan direksi yang kuat yang enggan membagi wewenang dan tidak memberikan informasi yang cukup pada dewan komisaris independen sehingga peran dewan komisaris independen menjadi terhambat. Selain itu, penunjukkan dewan komisaris independen dikarenakan hanya adanya hubungan keluarga atau kedekatan sehingga dewan komisaris independen yang ditunjuk bukan merupakan pihak yang berkompeten dalam bidang usaha entitas. Sedangkan kedudukan dewan komisaris independen yang terlalu kuat yang dapat mengintervensi dewan direksi yang berdampak pada efektifitas direksi dalam pengambilan keputusan. Menurut Utami dkk. (2012) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan lebih dari 50% dapat mewujudkan monitoring yang lebih efektif di perusahaan. Namun dalam penelitian ini rata-rata dewan komisaris independen sebesar 57,106% yaitu lebih dari 50% dan telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tahun 2013 untuk Semua Bank Konvensional bahwa proporsi dewan komisaris independen minimum 50% dari total dewan komisaris di perusahaan, akan tetapi belum mampu membuktikan bahwa dewan komisaris independen mempengaruhi pengungkapan wajib laporan keuangan karena tidak memiliki kuasa penuh dan lebih membahas terkait strategi pada perusahaan.

5. Pengaruh kualitas audit terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan

Kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP yang digunakan berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Dengan demikian, maka H_5 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Hidayat (2017) bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian perusahaan perbankan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *big four* akan lebih patuh untuk melakukan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *big four* akan lebih mempertahankan komitmen yang lebih besar dalam kualitas auditnya dan laporan yang diperiksa oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* memberikan keyakinan yang lebih besar pada investor. Hal ini dikarenakan KAP yang berafiliasi dengan *big four* akan memberikan arahan pada perusahaan yang menggunakan jasanya untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan baik oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ataupun BI (Bank Indonesia) sehingga perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih lengkap dalam laporan keuangan dan disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Semakin lengkap informasi yang disajikan akan memberikan kejelasan informasi sebenarnya di perusahaan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan.